



# "WTP" Dibawa ke Kecamatan

**YOGYA. TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana untuk membuat kebijakan baru agar azas transparansi keuangan bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Di antaranya adalah dengan memberikan penilaian atas manajemen dan pencatatan aset dan barang dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan.

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini tidak hanya diterima Pemkot saja. Namun, ke depannya, kami juga akan melakukan penilaian hingga tingkat kecamatan dan memberikan *reward* pada manajemen yang baik.

• ke halaman 14

**Kalau ada yang bisa melakukan transaksi nontunai, kami juga akan memberikan hadiah dan penghargaan khusus**

**Heroe Poerwadi**

## "WTP" Dibawa ke Kecamatan

• Sambungan Hal 13

Bisa kami kasih semacam WTP juga," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi akhir pekan lalu.

Menurutnya, pemberian WTP dan *reward* bagi kecamatan itu nantinya akan dinilai oleh jajaran Pemkot. Dalam hal ini, akan melibatkan Inspektorat dalam menyiapkan skema penilaian terhadap pengelolaan keuangan di tiap kecamatan.

Heroe melanjutkan, adanya penilaian ini justru akan membawa dampak positif bagi manajemen keuangan di kecamatan. Selain itu, pemantauan pada aliran keuangan pun akan semakin transparan. Termasuk, mendorong kecamatan untuk bisa bertanggung jawab pada keuangan mereka masing-masing.

Penilaian pun, kata dia, bisa dilakukan dengan memeriksa semua proses pengeluaran dan pendapatan mulai dari segi administrasi hingga evaluasi. Sehingga, nantinya ada kecamatan yang akan mendapat penghargaan WTP, WDP, dan lainnya, tergantung dari penilaian yang dilaksanakan.

**Nontunai**

Dia menyebut, untuk mendukung langkah transparansi keuangan itu juga akan dilakukan dengan pemberian hadiah pada OPD dan kecamatan yang bisa melakukan transaksi nontunai. Dia berharap, hingga November ini sudah ada OPD dan juga kecamatan yang bisa menerapkan hal ini.

"Kalau ada yang bisa melakukan transaksi nontunai, kami juga akan memberikan hadiah dan penghargaan khusus," jelasnya.

Dorongan untuk melakukan transaksi nontunai ini, menurut Wahyu adalah untuk mempertanggungjawabkan keuangan agar lebih terkendali. Selain itu, adanya transaksi nontunai ini juga akan meniadakan uang disimpan dalam brankas dan laci.

"Semuanya nanti akan dilakukan secara digital dan sistem transfer. Jadi lebih terpantau dan transparan," ujar Heroe.

Heroe juga menambahkan, adanya delapan temuan dalam opini WTP itu harus segera ditindaklanjuti. Temuan itu cukup wajar lantaran semakin banyak opini WTP yang diraih suatu daerah, maka sistem pengawasan dan verifikasi menjadi lebih ketat.

**Pemacu**

Inspektur Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, mengatakan, pihaknya masih mempersiapkan untuk penilaian sistem pengelolaan keuangan hingga tingkat kecamatan. Hal ini, kata dia, akan menjadi salah satu pemacu agar setiap kecamatan bisa memberikan manajemen keuangan yang terbaik dan mampu mencatat dengan baik.

"Ranking terbaik memang nanti akan mendapatkan hadiah. Termasuk, akan dapat predikat WTP atau nanti dengan nama lain," jelasnya. (ais)

Netral Biasa

## Penilaian Jangan Subjektif

**ADANYA** terobosan kebijakan baru untuk memberikan penilaian pada keuangan masing-masing kecamatan adalah langkah baik. Hanya, Pemkot diharapkan untuk memberikan standar penilaian yang diketahui khalayak agar tidak terkesan subjektif. Demikian dikatakan Baha-

ruddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) menyikapi kebijakan dari Pemkot setempat yang akan memberikan reward seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada kecamatan.

● ke halaman 14

### Penilaian Jangan Subjektif

● Sambungan Hal 13

Dia menyambut hal itu dengan baik, namun standar penilaian harus jelas.

"Reward dan punishment-

nya harus jelas. Jangan penilaiannya terkesan subjektif, karena ada kecamatan yang dekat dengan kepala daerah dan sebagainya," jelasnya, Minggu (4/6).

Menurutnya, semangat untuk menerapkan azas transparansi ini juga perlu didukung dengan melibatkan

penilaian dari masyarakat. Masyarakat juga bisa memberikan penilaian pada pelayanan bagi kecamatan.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah program kebijakan ini bisa konsisten dilaksanakan. Jangan sampai Pemkot hanya angin-anginan melaksanakan kebijakan ini

dan tidak ada dampak perubahan yang baik bagi pelayanan dan keuangan kecamatan.

"Harus konsisten, ingat dulu ada program dialog warga yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Jangan sampai hanya sebentar saja gaungnya," ulasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. BPKAD	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005